



Politik Identitas Marga Karo dalam Menentukan Pilihan Politik pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Kem-Kem Kecamatan Tigabinanga)

Gelora Rehliasta Sembiring^{1*}, Mangido Nainggolan²

¹⁻² Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email : gelora.3213111012@mhs.unimed.ac.id^{1*}, golanbatuara71@gmail.com²

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

*Penulis Korespondensi

Abstract: Identity politics refers to a political instrument employed by a group—such as an ethnic community, tribe, cultural group, religion, or others for specific purposes, either as a form of resistance or as a means to assert the group's identity. This form of politics is influenced by various factors, including religion, culture, tradition, and community leaders. This study aims to analyze the practice of identity politics within the village head election process in Kem-Kem Village, Tigabinanga District. A qualitative approach with a descriptive research design was employed. The research was conducted in Kem-Kem Village, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The data comprised both primary and secondary sources. Data analysis was carried out through the processes of data reduction, data display, and conclusion drawing (verification). The study examines the influence of clan-based identity politics in the village head election in Kem-Kem Village. The findings reveal that most community members continue to vote based on shared clan affiliation, driven by emotional and customary ties. However, a gradual shift toward rational politics has begun to emerge, particularly among the younger generation, who evaluate candidates based on work programs and competencies. The election of a village head from a minority clan serves as evidence of this change. Although the shift is not yet widespread, Kem-Kem Village demonstrates significant potential toward achieving a more equitable and rational form of local democracy.

Keywords: Identity Politics; Village Head Election; Rational Politics; Local Democracy; Kem-Kem Village.

Abstrak: Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Politik identitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya agama, budaya, tradisi, dan tokoh masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik budaya politik identitas yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Kem-Kem, Kecamatan Tigabinanga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Desa Kem-Kem, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Penelitian ini mengkaji pengaruh politik identitas marga dalam pemilihan kepala desa di Desa Kem-Kem. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memilih berdasarkan kesamaan marga karena ikatan emosional dan adat. Namun, mulai terlihat pergeseran ke arah politik rasional, terutama di kalangan generasi muda, yang menilai calon berdasarkan program kerja dan kompetensi. Terpilihnya kepala desa dari marga minoritas menjadi bukti perubahan ini. Meski belum merata, Desa Kem-Kem menunjukkan potensi menuju demokrasi lokal yang lebih adil dan rasional.

Kata Kunci: Demokrasi Lokal; Desa Kem-Kem; Pemilihan Kepala Desa; Politik Identitas; Politik Rasional.

1. PENDAHULUAN

Politik identitas dianggap sebagai senjata yang kuat oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik. Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia, terutama kondisi masyarakat Indonesia di mana suasana primordialisme dan sektarianisme masih cukup

kuat sehingga sangat mudah untuk memenangkan simpati publik, memicu kemarahan dan sentimen massa dengan menyebarkan isu-isu etnis, agama dan kelompok tertentu.

Politik identitas semakin mengemuka di Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun daerah sering kali diwarnai oleh isu-isu terkait identitas agama, etnis, dan kesukuan. Salah satu contohnya, pemilihan kepala desa yang memperlihatkan bagaimana politik identitas memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi perilaku pemilih.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai bagian dari proses demokrasi di tingkat desa telah menjadi tradisi yang penting dalam masyarakat Indonesia. Pilkades yang dilakukan secara langsung dan bebas memungkinkan warga desa untuk memilih calon kepala desa yang mereka anggap paling sesuai untuk mengembangkan desa mereka. Dalam proses Pilkades, faktor identitas suku dan agama serta keanggotaan dalam kelompok adat dan hubungan personal dengan calon dapat mempengaruhi *preferensi* politik masyarakat. Pemilihan kepala desa yang seharusnya menjadi sarana untuk berdemokrasi harus dinodai dengan *power interplay*, *conflict of interest* serta isu etnisitas yang menyebabkan pembelahan sosial dalam masyarakat berdasarkan klan (Windawati Pinem, 2023).

Demokrasi lokal yang seharusnya dimaknai sebagai sebuah sistem yang netral, justru beralih dengan pemusatan pada satu kelompok etnis saja. Calon-calon mencoba memanfaatkan simbol-simbol identitas etnis mereka untuk menunjukkan kepada warga yang memiliki latar belakang etnis serupa bahwa mereka berkomitmen untuk memajukan dan mewakili kelompok etnis tersebut dalam pemerintahan (Julia Ivanna, 2024).

Dengan adanya ikatan yang erat pada identitas etnis, hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap perilaku pemilih dan pertimbangan politik mereka. Artinya, sulit dibayangkan bahwa masyarakat pemilih tidak menghiraukan latar belakang suku pasangan calon pemimpin daerah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi dinamika politik lokal dan bagaimana masyarakat desa dapat memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh lokal dan adat.

Kabupaten Karo, khususnya Desa Kem-Kem Kecamatan Tigabinanga. Politik identitas juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam setiap proses politik lokal. Kabupaten ini memiliki keragaman budaya dan etnis yang cukup beragam, dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku, seperti Karo, Batak, dan lainnya. Dalam Pilkades, calon kepala desa kerap kali menggunakan kedekatan etnis dan budaya sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Strategi ini dikenal sebagai politik identitas, di mana kedekatan hubungan sosial seperti kekerabatan dan marga digunakan untuk membangun basis kekuasaan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Halking, 2025) yang menyatakan bahwa, "Politik identitas merupakan strategi politik yang menggunakan hubungan keluarga dan juga ikatan kekerabatan berdasarkan marga untuk membentuk kekuasaan dan memperkuat posisi politik.

Politik identitas yang sangat mengedepankan suku, ras, agama, serta identitas kedaerahan untuk yang dapat meraup suara terbanyak dibandingkan dengan program kerja yang ditawarkan pada saat pemilihan kepala desa itu untuk kepentingan masyarakat yang berorientasi kerja politik. (Julia Ivana, 2023). Hal ini mencerminkan bagaimana identitas lokal berperan penting dalam dinamika politik di daerah tersebut. Desa Kem-Kem dikenal dengan sistem kekerabatan yang kuat dan pola pikir kolektif yang mendasari interaksi sosial mereka.

Pada Masyarakat karo terdapat beberapa marga Induk diantaranya, Ginting, Tarigan, Sembiring, Perangin-angin, Karo-karo, dan berikut susunan lima marga beserta cabangnya dalam suku karo (Farizal Nasution 2012).

Desa Kem-Kem adalah sebuah desa yang terletak di tanah Karo Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk 579 jiwa dengan suku karo 521 jiwa, suku jawa 30, suku alas 15, suku batak 13 jiwa dengan luas wilayah 6km². Desa ini dikenal sebagai wilayah yang masih kental dengan adat istiadat dan tradisi suku Karo. Desa Kem-Kem dihuni oleh lima marga utama, yaitu Karo-karo, Ginting, Tarigan, Sembiring, dan Perangin-angin. Dalam struktur sosial desa, Marga Ginting memiliki peran penting sebagai *simantek kuta*, mencerminkan posisi mereka yang dominan dalam tatanan masyarakat. Namun, dalam pemilihan kepala desa yang baru-baru ini berlangsung, muncul fenomena menarik ketika dua calon kandidat dari marga Ginting dan marga Kaban bersaing untuk memimpin desa. Meskipun marga Ginting memiliki pengaruh yang kuat dan sejarah panjang dalam kepemimpinan desa, hasil pemilihan menunjukkan bahwa calon dari marga Kaban berhasil terpilih sebagai kepala desa. Kejadian ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika politik lokal.

Keberhasilan calon dari marga Kaban dalam Pilkades Desa Kem-Kem bukanlah suatu kebetulan semata, melainkan cerminan dari keunggulan personal, strategi politik yang efektif, serta kemampuan menjangkau berbagai lapisan masyarakat desa. Calon dari marga Kaban dikenal sebagai sosok yang merakyat, aktif dalam kegiatan sosial. Salah satu keunggulan calon marga Kaban adalah pendekatannya yang inklusif dan tidak eksklusif terhadap marganya sendiri. Ia mampu merangkul lintas marga, membangun komunikasi yang harmonis dengan tokoh-tokoh dari marga lain, serta menyampaikan visi pembangunan desa yang konkret dan realistik. Kemampuan berkomunikasi yang baik dan sikap yang terbuka menjadikannya pilihan yang dinilai mampu memimpin di tengah keberagaman masyarakat Desa Kem-Kem. Selain itu, dukungan dari kelompok muda menjadi faktor penting dalam menguatkan elektabilitasnya.

Kemenangan ini juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma politik masyarakat Desa Kem-Kem, dari yang sebelumnya sangat terikat pada faktor genealogis seperti marga dominan, menuju penilaian berbasis kapabilitas dan integritas individu. Ini merupakan indikasi bahwa masyarakat semakin rasional dan terbuka terhadap perubahan kepemimpinan.

Proses pemilihan kepala desa di Kem-Kem mencerminkan dinamika sosial dan kultural yang kompleks dalam masyarakat Karo. Pemilihan ini tidak hanya melibatkan aspek politik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor genealogis dan kultural yang kuat. Marga Ginting, sebagai pengulu desa, memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat; namun, keberhasilan calon dari marga Kaban menunjukkan adanya perubahan dalam *preferensi* pemilih dan dinamika kekuasaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hubungan antar marga, kepentingan politik, serta nilai-nilai budaya mempengaruhi keputusan pemilih. Selanjutnya, pemilihan kepala desa di Kem Kem juga dapat dilihat sebagai refleksi dari perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat Karo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai proses pemilihan kepala desa di Kem-Kem serta untuk menganalisis bagaimana interaksi antara dua marga tersebut dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan stabilitas sosial di desa. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah peran media dalam membentuk opini publik selama proses pemilihan. Dalam era digital saat ini, informasi dapat tersebar dengan cepat melalui berbagai *platform* media sosial. Hal ini berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon-calon kepala desa. Penelitian ini akan mencakup analisis tentang bagaimana media berperan dalam membentuk narasi seputar calon dari marga Ginting dan marga Kaban serta dampaknya terhadap keputusan pemilih. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Dengan terpilihnya calon dari marga Kaban, muncul pertanyaan tentang bagaimana hal ini akan memengaruhi hubungan antar marga di Kem Kem ke depannya. Apakah akan terjadi rekonsiliasi atau justru ketegangan baru? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab agar masyarakat dapat belajar dari pengalaman politik mereka.

Konteks kebijakan publik, penelitian ini juga akan membahas bagaimana hasil pemilihan kepala desa dapat memengaruhi program-program pembangunan di Desa Kem-Kem. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, kepala desa memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan, menyediakan layanan public (Julia Ivana, 2024). Dan kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga memperhatikan aspirasi semua marga yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan inklusif dalam pengambilan keputusan.

Penelitian terbaru mengenai politik identitas menunjukkan bahwa identitas sosial seperti agama, etnisitas, dan kekerabatan masih menjadi faktor penting dalam membentuk *preferensi* politik, terutama dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Studi oleh Muhtadi (2020) menemukan bahwa politik identitas semakin menonjol dalam pemilihan lokal di Indonesia, di mana kandidat sering kali memanfaatkan identitas sosial untuk meraih dukungan. Identitas sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi pemilih terhadap kredibilitas dan kapabilitas kandidat (Julia Ivanna, 2024). Dalam konteks Pilkades penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memilih calon yang berasal dari kelompok sosial yang sama, terutama dalam komunitas dengan ikatan tradisional yang kuat. Hal ini

membuktikan bahwa politik identitas tidak hanya memengaruhi pemilihan di tingkat nasional, tetapi juga memainkan peran signifikan dalam politik desa.

Fenomena politik identitas di Desa Kem Kem, Kecamatan Tigabinanga, sangat terlihat dengan etnisitas dan hubungan kekerabatan menjadi penentu utama dalam Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan penelitian terbaru oleh Rahmawati (2024), pemilihan kepala desa di daerah pedesaan sering kali dipengaruhi oleh identitas sosial yang mendalam, di mana calon yang memiliki kesamaan etnis dan agama dengan pemilih lebih mudah mendapatkan dukungan. Studi ini menunjukkan bahwa politik identitas dalam Pilkades dapat memperkuat solidaritas kelompok, namun juga berisiko menciptakan segregasi sosial antar komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana politik identitas berfungsi dalam konteks lokal seperti di Desa Kem Kem, guna memahami dampaknya terhadap demokrasi lokal dan stabilitas sosial.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana politik identitas memengaruhi pilihan politik di tingkat lokal, khususnya di Desa Kem-Kem. Dengan mengetahui peran politik identitas dalam Pilkades, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak identitas sosial terhadap dinamika politik desa. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi potensi perpecahan sosial akibat politik identitas dan memberikan rekomendasi untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih inklusif dan demokratis.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis fenomena politik identitas marga dalam pemilihan kepala desa di Desa Kem-Kem, Kecamatan Tigabinanga. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran struktur sosial dan nilai budaya lokal dalam memengaruhi preferensi politik masyarakat tanpa memanipulasi variabel yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga diperoleh gambaran yang kaya mengenai keterkaitan antara identitas marga dan perilaku memilih warga desa.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Kem-Kem dengan subjek yang dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala desa, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemilih aktif. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan terkait politik identitas marga. Variabel penelitian difokuskan pada tiga indikator, yaitu: (1) pilihan berdasarkan kedekatan marga, (2) pengaruh struktur marga dalam politik desa, dan (3) pergeseran ke arah politik rasional. Indikator tersebut diukur melalui pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang akurat dan kontekstual.

Analisis data dilakukan secara interaktif sesuai model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dimulai sejak pengumpulan data di lapangan, dengan tujuan mengidentifikasi tema dan pola yang muncul secara alami. Reduksi data dilakukan untuk memfokuskan pada informasi yang relevan, sementara penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan interpretasi. Tahap akhir berupa verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi temuan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan realitas sosial-politik yang terjadi di masyarakat Desa Kem-Kem.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sebuah wilayah yang khas dengan letaknya di dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan. Secara astronomis, Kabupaten Karo berada pada koordinat $2^{\circ}50' - 3^{\circ}19'$ Lintang Utara dan $97^{\circ}55' - 98^{\circ}38'$ Bujur Timur, dengan total luas wilayah $2.127,25\text{ km}^2$. Ketinggiannya bervariasi antara 120 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut, menghasilkan iklim sejuk dengan suhu rata-rata 16°C hingga $27,7^{\circ}\text{C}$, menjadikannya sangat subur untuk pertanian.

Secara administratif, Kabupaten Karo berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang di utara, Kabupaten Dairi dan Toba Samosir di selatan, serta Deli Serdang dan Simalungun di timur. Di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, menunjukkan perannya sebagai penghubung antarprovinsi. Kabupaten Karo terbagi menjadi 17 kecamatan, termasuk Berastagi, Barusjahe, Merek, Payung, Kabanjahe, Tiga Panah, Munte, Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Dolat Rayat, Merdeka, Simpang Empat, Naman Teran, Kuta Rakyat, dan Tiga Binanga. Setiap kecamatan ini memiliki kekhasan dan potensi lokal yang beragam.

Fokus penelitian ini adalah Desa Kem-Kem, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Tigabinanga. Kecamatan Tigabinanga sendiri merupakan kecamatan yang terdiri dari desa-desa berikut: Batumamak, Bunga Baru, Gunung, Kem-kem, Kuala, Kuta Bangun, Kuta Buara, Kuta Galoh, Kuta Gerat, Kuta Julu, Kuta Raya, Kutambaru Punti Batu Mama, Lau Kapur, Limang, Perbesi, Pergendangan, Pertumbukan, Simolap, dan Simpang Pergendangan Perlamben.

Kecamatan Tigabinanga terletak di bagian barat Ibu Kota Kabupaten Karo, dengan Kantor Camatnya berada pada lintang $3,0729$ dan bujur $98,2415$. Tingkat ketinggiannya berkisar antara 490 sampai 750 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah $160,38\text{ km}^2$. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Kutabuluh di utara, Juhar di selatan, Laubaleng di barat, dan Munte di timur. Kondisi geografis dan persebaran desa-desa ini memengaruhi aksesibilitas serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat setempat, yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian dan perkebunan.

Desa Kem kem adalah sebuah desa yang dengan nilai-nilai budaya yang kental dan masyarakat yang damai hidup dengan Rukun, menciptakan kehidupan yang baik, damai bagi masyarakat Desa Kem kem ini. Tanah subur dan indah Desa Kem kem ini memiliki potensi yang menjadi program pemerintahan dan andalan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Seperti potensi sumber daya alam yang berbasis lingkungan potensi keberagaman, kebhinekaan dan potensi kebudayaan, dan dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama bapak Sinar Kaban.

Desa Kem kem desa yang sejuk yang mayoritasnya petani. Desa Kem-Kem sudah berdiri sejak penjajahan belanda yang merupakan desa yang dikategorikan desa Tua yang ada di Kecamatan Tigabinanga yang berdiri sampai dengan saat ini. Desa Kem kem Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: (1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kuala. (2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Pergendangen. (3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Kuta Gamber, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi.(4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Lau Kapur

Luas wilayah Desa Kem kem adalah 600 ha yang sebagian besar merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini lah yang menjadi potensi utama di desa sehingga Mata pencarian pokok sebagian besar penduduk adalah bertani/berkebun.

Desa ini terdiri dari 216 keluarga dengan jumlah penduduk 633 jiwa dengan laki-laki 312 jiwa dan perempuan 321 jiwa. Berdasarkan Pendidikan penduduk desa ini dibagi menjadi:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Kem-Kem Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	46	47	93
2.	SD/Sederajat	112	113	225
3.	SMP/Sederajat	59	60	119
4.	SMA/Sederajat	55	60	115
5.	Diplomat I-III	25	26	51
6.	Diplomad IV/ Strata I	15	15	30

Visi dan Misi Desa Kem Kem

Visi : Desa Kem Kem yang Maju, Sejahtera, dan Berbudaya.

Misi : (1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Kem Kem melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai. (2) Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang ada. (3) Melestarikan dan mengembangkan budaya serta adat istiadat Desa Kem Kem sebagai identitas dan kebanggaan masyarakat. (4) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa Kem Kem melalui program-program yang efektif dan efisien. (5) Membangun tata pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Reduksi Data

Pilihan berdasarkan kedekatan Marga

Dalam konteks pemilihan kepala desa di Desa Kem-Kem, identitas marga terbukti masih menjadi faktor dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat. Hal ini tercermin dari responden yang menunjukkan kecenderungan kuat untuk memilih calon kepala desa yang berasal dari marga yang sama. Mereka menyatakan bahwa ada kedekatan emosional, hubungan batin, dan solidaritas semarga yang menjadi alasan utama dalam pengambilan keputusan politik Roy Sandy Ginting misalnya, menjelaskan bahwa :

“Iya, secara pribadi saya memang merasa lebih nyaman memilih calon yang berasal dari marga saya sendiri. Soalnya kami merasa lebih dekat secara batin, ada hubungan darah, jadi kalau dia terpilih, kami merasa dia akan lebih memperhatikan kami. Di kampung ini, hubungan marga itu masih sangat kuat, jadi wajar kalau banyak warga, termasuk saya, lebih condong ke calon yang satu marga”.

Kemudian wawancara dengan Ibuk Nellyani br Sembiring, beliau mengatakan bahwa :

“Iya, saya pasti lebih memilih calon dari marga saya sendiri. Rasanya lebih yakin, karena kita merasa punya ikatan batin. Apalagi kalau dia menang, kan bisa lebih memperhatikan kita, karena kita satu marga. Bagi saya, itu bentuk kebanggaan juga.”

Pernyataan ini semakin dikuatkan oleh Rio Efendi Karo-Karo, yang menekankan seberapa besar pengaruh hubungan kekerabatan atau kesamaan marga dalam keputusan memilih calon kepala desa di desa tersebut. Rio Efendi Karo-Karo menyatakan bahwa:

“Sangat besar pengaruhnya, bang. Apalagi kalau sudah ada pertemuan keluarga besar, biasanya sudah sepakat siapa yang mau didukung. Ini kadang jadi kewajiban juga bang, karena kita harus mendukung saudara kita”.

Keterkaitan antara nilai-nilai budaya dan adat istiadat dengan pilihan politik juga sangat menonjol. Piah Ngena br Ginting menegaskan hubungan erat ini dalam pernyataannya mengenai pengaruh mendalam adat marga terhadap keputusannya memilih kepala desa. Ia menjelaskan bahwa:

“Nilai-nilai adat memang masih kami jaga. Dalam adat Karo, semarga itu harus saling dukung. Jadi ketika ada orang semarga mencalonkan diri, kami anggap itu bukan cuma kepentingan pribadi, tapi juga harga diri marga. Apalagi di kampung, adat itu masih kuat terasa, jadi pilihan saya banyak dipengaruhi hal itu.”

Tidak semua warga sepakat dengan praktik politik identitas yang berbasis marga. Sejumlah responden menunjukkan sikap yang kritis dan cenderung menolak menjadikan identitas marga sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik. Mereka lebih mengedepankan rasionalitas, kapabilitas calon, serta program kerja konkret dalam menentukan pilihannya.

Ndolit br Tarigan misalnya, secara tegas menolak memilih hanya karena kesamaan marga. Ia menyatakan:

“Menurut saya, memilih calon kepala desa itu harus berdasarkan siapa yang paling mampu dan punya visi jelas, bukan semata-mata karena marganya sama. Kalau semua orang hanya pilih karena marga, desa kita tidak akan maju.”

Sikap serupa juga diungkapkan oleh Ratno Tarigan yang menekankan pentingnya kemampuan calon kepala desa dalam membawa perubahan nyata.

“Menurut saya, memilih pemimpin itu soal siapa yang paling mampu membawa perubahan untuk desa. Marga hanya identitas, tapi kemampuan dan tanggung jawab lebih penting.”

Person Sitepu, yang mewakili generasi muda, juga menyuarakan hal yang sama. Ia mengakui adanya tekanan sosial dari keluarga besar, namun tetap memutuskan berdasarkan pertimbangan pribadi. Menurutnya, kepala desa haruslah sosok yang memiliki rencana kerja yang jelas dan bukan hanya berasal dari marga tertentu.

“Kadang keluarga besar menekan supaya dukung calon dari marga sendiri, tapi saya pribadi tetap ambil keputusan sendiri berdasarkan penilaian saya.”

Pandangan serupa disampaikan oleh Iwan Sebayang. Ia menyatakan bahwa:

“Saya justru merasa tidak adil kalau kita hanya memilih karena marga. Kita ini hidup dalam satu desa, bukan satu marga saja. Jadi kepala desa harus dipilih berdasarkan siapa yang paling sanggup bekerja, bukan karena dia senina”

Jenda Malem br Depari, meski berasal dari generasi tua, memperlihatkan pemikiran yang cukup progresif. Menurutnya, tekanan sosial dan budaya sebaiknya tidak menjadi penentu dalam pemilihan pemimpin desa. Ia menyatakan:

“Dulu mungkin iya, tapi sekarang tidak lagi. Saya sudah terlalu sering lihat orang dipilih hanya karena marganya, tapi waktu sudah menjabat, dia tidak ingat siapa pun.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Seri Sebayang:

“Meskipun dia semarga dengan saya, kalau saya rasa dia tidak punya kemampuan atau tidak tulus, saya tidak akan pilih. Lebih baik memilih orang dari marga lain tapi benar-benar punya niat membangun.”

Keterkaitan antara nilai-nilai budaya dan adat istiadat dengan pilihan politik di desa Kemkem adalah hal yang sudah lama terjadi. Hal ini karena sebagian besar masyarakat desa Kem-Kem masih berpegang kuat terhadap nilai-nilai budaya dan adat istiadat, sehingga menimbulkan rasa enggan pada masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan ini. Hal tersebut diperjelas saat melakukan wawancara dengan Bapak Alamat Sebayang selaku salah satu tokoh adat masyarakat desa Kemkem menyatakan bahwa:

“Bisa dua-duanya. Di satu sisi, memang terlihat kompak. Tapi di sisi lain, juga bisa jadi tekanan. Saya lihat ada orang yang sebenarnya ingin pilih calon lain, tapi terpaksa ikut suara keluarga atau tokoh marga. Ini yang kadang saya khawatirkan, karena seharusnya dalam

demokrasi, orang bebas memilih.”

Pemilihan kepala desa di Desa Kem-Kem menunjukkan bahwa politik identitas berbasis marga masih menjadi faktor dominan dalam menentukan *preferensi* politik masyarakat. Kesamaan marga dianggap sebagai bentuk kedekatan emosional, solidaritas sosial, serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang mengajarkan pentingnya saling mendukung antarsemarga. Praktik ini diperkuat oleh peran tokoh adat dan tekanan sosial dalam keluarga besar yang mendorong warga untuk memilih calon dari marga yang sama. Namun demikian, terdapat pula sebagian masyarakat yang mulai menolak pendekatan politik identitas dan lebih memilih berdasarkan rasionalitas, kompetensi calon, serta program kerja yang ditawarkan. Kelompok ini menilai bahwa pemilihan pemimpin seharusnya tidak lagi didasarkan pada hubungan kekerabatan semata, melainkan pada kemampuan calon dalam membawa perubahan nyata bagi desa.

Pengaruh Struktur Marga Dalam Politik Desa

Pengaruh struktur marga dalam politik desa kem-kem juga masih kuat dalam menentukan pilihan politik masyarakat khususnya dalam pemilihan kepala desa. Identitas marga masih menjadi pertimbangan dominan dalam proses pemilihan kepala desa. Sebagian besar masyarakat menyatakan kecenderungan untuk memilih calon dari marga yang sama, dengan alasan kedekatan emosional, dan kepercayaan terhadap kesamaan latar belakang adat. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan Ibu Nellyani br Sembiring selaku salah satu anggota masyarakat yang sudah lama tinggal di desa kem-kem, yang menyatakan bahwa:

“Dari kecil kami diajarkan untuk setia sama semarga. Jadi kalau ada yang dari Sembiring maju, pasti kami dukung. Itu bukan soal politik saja, tapi juga bentuk tanggung jawab dan kekompakan. Kalau kita tidak kompak, bisa jadi bahan pembicaraan juga di tengah keluarga”.

Di Desa Kem-Kem, terdapat marga-marga tertentu yang memiliki dominasi kuat dalam memengaruhi arah pilihan politik masyarakat, khususnya dalam pemilihan kepala desa. Marga seperti Ginting disebut sebagai kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan dukungan politik. Dominasi ini tidak hanya terlihat dari jumlah anggota marga yang besar,. Penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Ratno Tarigan salah satu masyarakat di desa kem-kem yang menjelaskan:

“Biasanya Ginting lebih dominan karena mereka banyak jumlahnya dan punya pengaruh. Tapi saya pikir dominasi ini harus dikurangi supaya semua calon punya kesempatan yang adil, tidak hanya karena marganya”.

Ndolit br Tarigan juga menyatakan:

“Sangat memengaruhi. Karena kalau sudah dari marga besar dan punya tokoh adat, biasanya lebih mudah dapat dukungan. Tapi itu juga bisa bikin calon dari marga kecil susah berkembang.”

Hal senada disampaikan oleh Roy Sandy Ginting, yang menekankan kekuatan jumlah dan tokoh adat sebagai faktor dominasi:

“Marga Ginting itu termasuk yang paling berpengaruh di sini. Mereka punya banyak tokoh, jumlah orangnya juga lebih banyak, jadi arah politik desa biasanya banyak dipengaruhi oleh mereka. Apalagi kalau calon dari marga itu, biasanya lebih mudah dapat dukungan..”

Piah Ngena br Ginting juga menyebut bahwa:

“Marga Ginting seperti kami ini jumlahnya lumayan banyak dan punya beberapa tokoh juga. Jadi secara tidak langsung, arah dukungan masyarakat bisa terpengaruh kalau dari marga Ginting ada yang maju”.

Rio Efendi Karo-Karo menjelaskan bahwa dominasi marga tertentu bukan hanya dari jumlah, tetapi juga dari posisi sosial tokohnya:

“Iya, saya rasa marga Ginting seringkali mendominasi, terutama karena mereka punya tokoh adat yang cukup berpengaruh. Tapi saya yakin semua marga juga punya kesempatan yang sama, asal bisa solid.”

Dominasi struktur marga ini tidak jarang menimbulkan persoalan ketidakadilan dalam kontestasi politik lokal, terutama bagi calon dari marga minoritas yang memiliki keterbatasan pengaruh sosial. Jenda Malem br Depari menyampaikan:

“Marga yang besar biasanya lebih kuat karena orang-orangnya banyak dan tokoh adatnya juga didengar. Tapi kadang jadi nggak adil untuk yang dari marga kecil.”

Begitu juga Seri Sebayang, yang mengakui bahwa:

“Iya, seperti marga Ginting biasanya kalau ada yang maju dari situ langsung jadi pusat perhatian. Tapi menurut saya, itu belum tentu baik. Kadang yang ramai malah tidak punya rencana jelas, hanya karena dukungan marga besar.”

Pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan oleh bapak Iwan Sebayang, beliau menyatakan bahwa:

“Di desa ini, biasanya kalau yang maju dari marga Ginting langsung ramai dibicarakan. Tapi kadang itu tidak adil bagi calon dari marga lain. Harusnya semua calon punya peluang yang sama.”

Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh bapak Alamat Sebayang yakni:

“Hal ini terjadi mungkin karena silsilah dan sejarah yang terukir di desa Kem Kem, di mana marga Ginting yang memiliki memiliki istri br Sembiring sebagai simanteki Kuta atau sering disebut pendiri desa telah menanamkan nilai-nilai adat jauh sebelum desa ini berkembang seperti saat ini. Dan hal ini masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat desa ini di kehidupan sehari-hari, meskipun desa ini juga dihuni oleh marga kelompok kecil seperti Tarigan, Karo-Karo, dan Sebayang Mungkin ini yang membuat hal demikian masih terjadi”.

Selain struktur marga yang masih dominan di desa Kem-Kem dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat dalam memilih kepala desa, tokoh adat atau tetua marga di desa kem-kem mempunyai andil besar untuk mempengaruhi pilihan politik pada masyarakat. Banyak warga mengakui bahwa sebelum masa pemilihan, sering diadakan pertemuan keluarga besar atau forum marga, tempat di mana arahan atau ajakan memilih calon tertentu disampaikan oleh tokoh adat. Hal ini dijelaskan juga melalui hasil wawancara dengan Bapak Alamat Sebayang selaku salah satu tokoh adat di desa kem-kem, menyatakan bahwa:

“Kami para tokoh adat biasanya diminta pendapat sebelum pemilihan. Ada yang tanya, "Siapa yang sebaiknya dipilih?" Tapi saya pribadi lebih memilih netral, saya hanya sampaikan, "Pilih yang menurutmu pantas, bukan hanya karena marga." Tapi tidak semua tokoh bersikap begitu, banyak juga yang terang-terangan arahkan ke calon tertentu”.

Meskipun arahan tokoh adat atau tetua marga memang tidak bersifat memaksa, dalam menentukan pilihan pada masyarakat desa, namun masyarakat seperti merasa “wajib secara moral” mengikuti arahan tersebut karena rasa hormat terhadap adat dan tetua. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Person Sitepu bahwa:

“Sejauh yang saya tahu, iya. Arahan itu disampaikan dalam bentuk ajakan yang halus, bukan paksaan. Tapi karena masyarakat masih sangat menghargai tetua adat, ajakan itu jadi seperti perintah. Saya pribadi memilih untuk mendengar tapi tetap menilai sendiri.”

Struktur marga memiliki pengaruh kuat dalam membentuk arah pilihan politik masyarakat Desa Kem-Kem, terutama dalam pemilihan kepala desa. Marga dominan yang ada di desa kem-kem bukan hanya memiliki kekuatan jumlah, tetapi juga kekuasaan simbolik di desa kem-kem. Pentingnya peran tokoh adat dan tetua marga dalam mengarahkan pilihan politik jelas terlihat. Karena tingginya penghormatan terhadap adat, masyarakat merasa secara moral berkewajiban mengikuti arahan tersebut.

Pergeseran ke politik rasional

Pergeseran menuju politik yang lebih rasional mulai terlihat di desa kem-kem, terutama dari kalangan masyarakat yang sudah mulai berpikir kritis dan terbuka. Sebagian warga menyatakan mulai memisahkan antara urusan adat dan budaya dengan pilihan politik. Mereka lebih menekankan pentingnya program kerja, visi-misi calon, kejujuran, serta kompetensi dibanding sekadar kesamaan marga. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu ibu Ndolit br Tarigan mengenai masyarakat desa yang saat ini mulai menilai calon kepala desa berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan lagi berdasarkan identitas marganya beliau mengatakan bahwa:

“Sudah mulai, terutama dari kalangan muda dan mereka yang sering ikut kegiatan masyarakat. Tapi butuh waktu. Masih banyak yang melihat marga dulu baru kemampuan. Ini tantangan yang harus terus didorong berubah..”

Senada dengan itu, Bapak Ratno Tarigan menyatakan bahwa : Jenda Malem br Depari, Ratno Tarigan, Roy Sandy Ginting, Piah Ngena br Ginting, Nellyani br Sembiring, Iwan Sebayang, dan Person Sitepu.

“Sudah mulai, tapi belum merata. Generasi muda lebih terbuka pikirannya, tapi generasi tua masih kuat dipengaruhi oleh identitas marga. Perlu lebih banyak sosialisasi dan diskusi supaya masyarakat tidak terpaku pada identitas semata”

Hal ini juga disampaikan bapak Person Sitepu yang menyatakan;

“Sudah ada kemajuan, terutama dari kalangan muda. Tapi di tingkat yang lebih tua atau di daerah kampung dalam, politik marga masih sangat kuat. Masyarakat masih sulit untuk benar-benar lepas dari pengaruh identitas.”

Senada dengan itu ibuk Jenda Malem br Depari menyampaikan;

“Ada yang sudah mulai sadar, terutama yang muda. Tapi masih banyak juga yang terikat pada marga, tapi saya percaya nanti masyarakat makin pintar memilih”.

Hal ini sudah mulai terlihat dari kepala desa terpilih berasal dari marga yang minoritas, menunjukkan bahwa masyarakat mulai mempertimbangkan aspek rasional, bukan hanya solidaritas marga. Dalam penjelasan yang dikatakan oleh bapak Sinar Kaban selaku kepala desa kem-kem menyatakan bahwa:

“Sebagian besar masyarakat cenderung memilih calon kepala desa berdasarkan kesamaan marga, bahkan ada calon lain yang awalnya lebih diunggulkan hanya karena marganya lebih besar. Tapi alhamdulillah, banyak warga yang akhirnya berubah pikiran setelah mendengar visi dan misi saya. Jadi pengaruhnya besar, tapi bukan penentu satu-satunya”.

Penjelasan di atas mencerminkan sebagian warga sudah mulai memisahkan antara urusan adat dan pilihan politik. Mereka lebih menekankan pentingnya program kerja, visi-misi calon, kejujuran, serta kompetensi dibanding sekadar kesamaan marga.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sebagian besar masyarakat desa kem-kem menunjukkan sikap rasional dalam menentukan pilihan politik. Namun demikian, belum semua warga desa bersikap rasional. Beberapa di antaranya masih ada yang mencerminkan pilihan politik berdasarkan marga dan adat istiadat kelompok tertentu. Selain itu keberhasilan pendekatan rasional yang telah diterapkan dalam pemilihan kepala desa kem-kem belum merata diterapkan oleh masyarakat desa kem-kem. Tetapi sudah banyak masyarakat seringkali mengganti pilihan calon karena program kerjanya lebih bagus dan masuk akal. Hal ini diperkuat oleh Bapak Seri Sebayang yang menyatakan bahwa:

“Sudah pernah. Waktu itu keluarga besar saya dukung calon dari marga Ginting juga, tapi saya pilih yang lain karena dia lebih jelas dalam menjelaskan rencana untuk desa. Dan saya tidak menyesal”.

Kemudian hal ini juga diperjelas oleh beliau dengan menyatakan bahwa:

“Sudah mulai, terutama anak-anak muda. Tapi yang tua-tua banyak yang masih terpengaruh oleh marga. Saya ingin generasi muda terus belajar bahwa memilih itu harus berdasarkan akal sehat, bukan karena tekanan atau gengsi marga”.

Beberapa masyarakat di desa Kem-Kem masih mempertahankan kedekatan marga dalam memilih calon kepala desa, namun sebagian besar masyarakat juga sudah mulai memilih berdasarkan program

kerja, visi, misi, kejujuran, serta kompetensi calon. Seperti yang disampaikan bapak Roy Sandy Ginting yang menyatakan:

“Sudah mulai ada perubahan, terutama anak-anak muda sekarang. Mereka lebih terbuka dan tidak terlalu terikat pada marga. Tapi generasi tua seperti saya masih banyak yang melihat dari sisi marganya.”

Hal ini juga disampaikan ibuk Piah Ngena br Ginting:

“Sudah mulai ada, apalagi dari kalangan anak muda. Tapi kalau yang seusia saya, masih banyak yang menilai berdasarkan marga. Karena kami anggap itu lebih bisa dipercaya dan lebih dekat secara emosional”.

Hal ini juga disampaikan bapak Rio Efendi Karo-Karo:

“Sudah mulai ada, apalagi dari kalangan anak muda. Tapi kalau yang seusia saya, masih banyak yang menilai berdasarkan marga. Karena kami anggap itu lebih bisa dipercaya dan lebih dekat secara emosional.”

Selaras dengan yang disampaikan Nellyani br Sembiring:

“Ada yang mulai begitu, tapi belum semua. Saya pribadi tetap lebih percaya pada politik marga. Soalnya, kalau kita salah pilih karena tergiur janji-janji saja, bisa menyesal. Tapi kalau yang kita pilih satu marga, kita bisa saling mengingatkan”

Meski identitas marga masih kuat di kalangan generasi tua, namun generasi muda dan beberapa kelompok masyarakat mulai mendorong demokrasi desa yang lebih sehat, adil, dan rasional di desa kem-kem. Namun hal ini jadi modal besar untuk memperbaiki pola pikir masyarakat desa kem-kem dalam menentukan sikap politik khususnya dalam politik di desa. Supaya masyarakat agar bisa menjalani proses pemilihan kepala desa dengan lebih adil, terbuka, dan tidak terjebak pada politik identitas yang sudah lama terjadi. Seperti yang dikatakan oleh bapak Alamat Sebayang selaku tokoh adat di desa kem-kem bahwa:

“Saya berharap masyarakat bisa lebih terbuka pikirannya. Kita harus berani memilih pemimpin karena kualitasnya, bukan karena hubungan darah. Kalau kita hanya terus pilih karena marga, desa ini akan jalan di tempat. Pemilihan itu seharusnya jadi cara untuk memilih yang terbaik, bukan sekadar yang paling dekat”.

Senada dengan itu, Bapak Sinar Kaban selaku kepala desa kem-kem saat ini mengungkapkan harapannya bahwa:

“Saya harap ke depan masyarakat bisa benar-benar memilih berdasarkan hati nurani dan pemahaman terhadap visi calon, bukan karena marga. Politik identitas marga sebaiknya dikurangi, karena kalau terus dibiarkan, akan menutup kesempatan bagi calon-calon berkualitas dari marga lain. Kita perlu pemimpin yang mampu, bukan yang hanya bermarga besar”.

Pergeseran menuju politik yang lebih rasional mulai terlihat dalam dinamika pemilihan kepala desa di Desa Kem-Kem. Khususnya beberapa kelompok masyarakat, mulai memisahkan antara urusan adat dan budaya dengan keputusan politik. Mereka lebih mempertimbangkan aspek program kerja, visi-misi,

kejujuran, dan kompetensi calon daripada sekadar kesamaan marga. Meskipun pengaruh identitas marga masih kuat, terutama di kalangan generasi tua, sebagian masyarakat mulai berani mengganti pilihan politiknya demi calon yang lebih mampu dan realistik dalam menawarkan solusi bagi desa. Kemunculan kesadaran politik yang lebih rasional menjadi modal penting dalam membangun demokrasi desa yang lebih adil, terbuka, dan berorientasi pada kemajuan masyarakat secara menyeluruh.

Penyajian Data (Display)

Tabel 2. Penyajian Data (Display Data)

Indikator	Sub Indikator	Kesimpulan
Pilihan berdasarkan kedekatan Marga	Beberapa kelompok masyarakat Desa Kem-Kem cenderung memilih calon kepala desa yang berasal dari marga yang sama karena merasa lebih dekat secara emosional. Selain itu, nilai-nilai adat dan menjaga harga diri marga turut memengaruhi pilihan mereka, menjadikan identitas marga sebagai faktor penting dalam keputusan politik.	Beberapa masyarakat Desa Kem-Kem masih kuat memegang politik identitas, di mana pilihan kepala desa didasarkan pada kedekatan dan dominasi marga, serta pengaruh tokoh adat. Meskipun ada indikasi pergeseran rasional di kalangan muda, pengaruh identitas marga tetap signifikan. Perubahan ini masih memerlukan waktu dan sosialisasi lebih lanjut untuk membebaskan masyarakat dari keterikatan identitas semata. Dorongan untuk memilih berdasarkan kapasitas dan program kerja nyata menjadi kunci untuk kemajuan desa di masa depan. Ini juga akan membantu memastikan semua calon, terlepas dari marganya, memiliki peluang yang sama.
Pengaruh struktur marga dalam politik desa	Desa Kem-Kem dominan dihuni oleh penduduk marga Ginting dan beberapa kelompok kecil seperti marga Sembiring, Tarigan, Karo-Karo, dan Sebayang. Posisi tokoh adat mempengaruhi dukungan dalam memberikan arahan pilihan politik masyarakat.	Struktur marga di desa Kem-Kem, memiliki pengaruh signifikan dalam politik desa. Dominasi populasi oleh marga Ginting, bersama dengan kelompok marga Sembiring, Tarigan, Karo-Karo, dan Sebayang, membentuk lanskap sosial-politik. Dalam konteks ini, posisi tokoh adat sangat mempengaruhi dukungan dan arahan pilihan politik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa

Pergeseran ke politik rasional

Pemilih kini mengutamakan program kerja, visi, dan misi calon kepala desa yang konkret dan realistik, mencari pemimpin yang kompeten, jujur, dan berani mengambil keputusan, serta memilih berdasarkan kapasitas daripada identitas marga.

hubungan kekerabatan dan hierarki adat masih menjadi faktor penentu dalam kontestasi politik lokal. Kondisi ini seringkali menjadi tantangan bagi calon di luar marga dominan.

Pemilih di desa Kem-Kem kini mengutamakan program kerja, visi, dan misi calon kepala desa yang konkret dan realistik, mencari pemimpin yang kompeten, jujur, dan berani mengambil keputusan, serta memilih berdasarkan kapasitas daripada identitas marga. Perubahan ini mencerminkan semakin matangnya pemilih dalam menilai calon pemimpin berdasarkan kualitas intrinsik mereka. Mereka semakin menyadari bahwa marga tidak menjamin keberhasilan atau kebaikan seorang pemimpin. Hal ini menandakan adanya harapan akan tata kelola desa yang lebih efektif dan akuntabel, yang didasarkan pada kinerja nyata daripada ikatan kekerabatan.

Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data mengenai pengaruh politik identitas dalam pemilihan kepala desa di Desa Kem-Kem, dapat disimpulkan bahwa identitas marga masih memegang peran yang sangat penting dalam membentuk arah pilihan politik masyarakat. *Preferensi* memilih calon kepala desa yang berasal dari marga yang sama menjadi ciri utama perilaku politik masyarakat setempat, yang berakar dari kedekatan emosional, hubungan kekerabatan, dan ikatan budaya yang kuat dalam struktur sosial adat Karo. Politik identitas ini tampak sangat dominan, terutama di kalangan masyarakat tua dan kelompok-kelompok yang masih berpegang teguh pada adat dan nilai tradisional.

Pertama, pilihan berdasarkan kedekatan marga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kem-Kem cenderung memilih calon kepala desa dari marga yang sama. Pilihan ini tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan darah, tetapi juga oleh perasaan tanggung jawab terhadap kekompakan senina (kelompok marga), serta kekhawatiran akan sanksi sosial atau pandangan negatif jika tidak

mendukung calon dari marga sendiri. Identitas marga berfungsi sebagai simbol kebanggaan dan solidaritas sosial yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga politik identitas berbasis marga menjadi bagian dari kultur politik lokal.

Kedua, struktur sosial marga dan peran tokoh adat sangat berperan dalam mengarahkan keputusan politik masyarakat. Tokoh adat dan tetua marga memiliki kekuatan simbolik dan sosial yang tinggi, dan sering kali memberikan arahan politik melalui forum-forum keluarga besar atau pertemuan adat. Arahan ini meskipun tidak bersifat memaksa, namun karena tingginya rasa hormat terhadap adat dan pemangku tradisi, membuat masyarakat merasa berkewajiban untuk mengikuti. Marga-marga dominan seperti Ginting memegang kekuasaan politik yang lebih besar karena kekuatan demografis dan pengaruh adat, sementara calon dari marga minoritas menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan.

Dominasi politik identitas dalam masyarakat tradisional seperti di desa Kem-Kem bukanlah sesuatu yang harus dimusuhi secara frontal, melainkan warisan sosial kultural yang telah membentuk identitas kolektif dan kohesi sosial masyarakat sejak lama. Politik identitas khususnya berbasis marga memiliki kelebihan tersendiri dalam konteks membangun solidaritas komunitas, memperkuat jaringan sosial, dan menjaga stabilitas relasi antar warga. Namun yang perlu dilakukan adalah mengarahkan dinamika politik identitas ke arah yang lebih inklusif, toleran, dan terbuka terhadap perubahan. Politik identitas tidak harus dimatikan, tetapi perlu dilampaui dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi yang lebih rasional.

Ketiga, meskipun politik identitas masih kuat, tanda-tanda pergeseran menuju politik rasional mulai terlihat. Beberapa kelompok masyarakat desa Kem-Kem mulai menempatkan program kerja, visi-misi, kompetensi, dan integritas calon sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan dalam pemilihan kepala desa. Hal ini terlihat dari keberhasilan calon kepala desa dari marga minoritas yang terpilih bukan karena ikatan marga, melainkan karena pendekatan programatik dan komunikasi yang rasional. Beberapa warga mulai mengganti pilihan politiknya setelah mendengar dan memahami visi pembangunan yang lebih konkret dan realistik dari calon tertentu.

Pergeseran paham politik rasional ini belum terjadi secara merata. masih terdapat sebagian masyarakat yang mempertahankan pola pikir tradisional, memilih berdasarkan marga dan tekanan sosial dari struktur adat. Ini menunjukkan bahwa transformasi menuju politik yang lebih rasional membutuhkan proses panjang, sosialisasi politik yang berkelanjutan, dan pendidikan politik yang menyentuh semua lapisan masyarakat.

Politik identitas marga masih sangat dominan di Desa Kem-Kem, namun mulai mengalami pergeseran ke arah politik rasional. Perubahan ini menjadi modal awal yang baik untuk membangun sistem demokrasi desa yang lebih adil, inklusif, dan berdasarkan pada kualitas serta kapasitas calon, bukan semata pada latar belakang kekerabatan. Dengan memperkuat pendidikan politik, peran tokoh adat yang objektif, serta mendorong partisipasi pemilih muda, diharapkan ke depan masyarakat Desa

Kem-Kem dapat menjalani proses demokrasi lokal yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kepemimpinan yang visioner dan bertanggung jawab.

Pembahasan

Pengaruh politik identitas berbasis marga dalam pemilihan kepala desa di Desa Kem-Kem merupakan faktor yang sangat dominan dalam memengaruhi perilaku politik masyarakat Desa Kem-Kem. Hal ini selaras dengan pendapat Julia Ivanna (2023) yang menyatakan bahwa politik identitas memperkuat solidaritas kelompok dengan menggunakan simbol-simbol kultural, seperti marga, sebagai sarana keterikatan dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini tidak terlepas dari budaya Karo yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan, serta struktur sosial adat yang menempatkan marga sebagai pusat kekuatan sosial dan politik. Loyalitas terhadap marga tidak hanya dipandang sebagai bentuk solidaritas dan kesetiaan, tetapi juga sebagai simbol kehormatan dan harga diri kelompok. Dalam konteks ini, mendukung calon kepala desa dari marga sendiri bukan sekadar pilihan politik, melainkan juga cerminan tanggung jawab sosial terhadap komunitas kekerabatan.

Desa Kem-Kem, mayoritas masyarakat menyatakan bahwa mereka lebih cenderung memilih calon kepala desa yang berasal dari marga yang sama. Kedekatan emosional, solidaritas semarga, dan warisan nilai-nilai adat menjadi alasan utama masyarakat dalam memilih. Ini menunjukkan bahwa pilihan politik berdasarkan marga bukan hanya bentuk kesetiaan sosial, tetapi juga dianggap sebagai kewajiban moral terhadap komunitas kekerabatan. Hal ini diperkuat oleh teori dari L.S. Al-Farisi (2018), bahwa politik identitas memanfaatkan ikatan primordial sebagai strategi untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu.

Dalam praktiknya, terdapat marga-marga dominan di desa kem-kem seperti Ginting, yang memiliki pengaruh besar dalam politik desa. Dominasi ini tidak hanya disebabkan oleh jumlah anggota marga yang besar, tetapi juga oleh posisi strategis mereka dalam struktur adat dan sosial di masyarakat, seperti tokoh adat atau tetua marga. Dr. L.B. Sembiring Meliala dalam (Bangun 1996) menyatakan bahwa dalam masyarakat Karo, struktur marga bukan sekadar simbol kekerabatan, melainkan sistem nilai sosial yang membentuk struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan kolektif. Sehingga calon dari marga dominan lebih mudah mendapatkan dukungan luas dan lebih besar dibandingkan calon dari marga minoritas di desa kem-kem. Tokoh adat juga memainkan peran penting dalam menentukan arah dukungan politik melalui komunitas-komunitas marga, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Alamat Sebayang. Fenomena ini memperlihatkan bahwa identitas marga dalam masyarakat desa kem-kem tidak hanya bersifat simbolik, melainkan fungsional dalam menentukan arah politik desa. Tokoh adat atau tetua marga berperan ganda sebagai pemelihara tradisi sekaligus pengarah sikap politik masyarakat. Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa mereka sering menerima arahan atau ajakan memilih dari tokoh adat yang dianggap sebagai bentuk petunjuk moral dalam ajang pemilihan kepala desa. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Person Sitepu, meskipun arahan tersebut bersifat halus, masyarakat merasa berkewajiban moral untuk mengikutinya.

Tokoh adat juga menjadi salah satu aktor penting sebagaimana dijelaskan Dauly (2019), bahwa tokoh lokal dapat memobilisasi dukungan politik masyarakat melalui pengaruh sosial dan kedekatan budaya. Ini memperkuat kesimpulan bahwa politik identitas di Desa Kem-Kem diperkuat oleh kekuatan budaya dan struktur sosial yang dijaga oleh tokoh-tokoh adat di desa itu. Hal ini karena pengetahuan politik masih minim di kalangan masyarakat desa sehingga membuat kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan memilih, kesetaraan hak politik, dan pentingnya akuntabilitas pemimpin, membuat sebagian masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial, arahan tokoh adat, atau pertimbangan marga yang tidak sesuai dengan politik rasional saat ini.

Meskipun politik identitas ini masih kuat di desa kem-kem, penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran menuju politik yang lebih rasional. Beberapa dari kelompok masyarakat di desa Kem-Kem, mulai mempertimbangkan program kerja, visi-misi, dan kapabilitas calon kepala desa sebagai dasar pilihan dalam pemilihan kepala desa. Hal ini sesuai dengan teori demokrasi lokal yang dikemukakan oleh Prayetno (2023), bahwa pemilih rasional akan memilih berdasarkan informasi, kualitas calon, dan kejelasan visi.

Ditinjau dari kepala desa saat ini, yang berasal dari marga minoritas, menjadi bukti nyata pergeseran ini. Warga desa seperti Ibu Ndolit br Tarigan, Bapak Seri Sebayang, dan Bapak Sinar Kaban menyatakan bahwa masyarakat kini mulai terbuka terhadap calon yang kompeten meskipun bukan dari marga yang dominan di desa kem-kem. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman baru dalam proses demokrasi desa itu bahwa kualitas lebih penting daripada hubungan marga sudah mulai dipertimbangkan dalam menentukan pilihan politik khususnya pemilihan kepala desa.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa politik identitas di Desa Kem-Kem masih berpengaruh, namun mulai bergeser seiring meningkatnya kesadaran politik pada masyarakat. Sejalan dengan teori Panjaitan (2023), politik identitas bisa menjadi alat perjuangan kelompok terpinggirkan, namun harus diarahkan agar tidak menutup kesempatan bagi calon berkualitas dari luar marga dominan. Kesadaran ini didukung oleh peran tokoh adat dan kepala desa yang mendorong perubahan.

Politik Desa Kem-Kem saat ini berada di antara warisan tradisional dan cita-cita demokrasi yang lebih adil, terbuka, dan ideal. Proses ini membutuhkan kesabaran, keberanian, dan kolaborasi antar elemen masyarakat untuk memastikan bahwa demokrasi desa tidak hanya menjadi rutinitas lima tahunan, tetapi benar-benar menjadi alat untuk memperkuat keadilan sosial, partisipasi aktif warga, dan lahirnya pemimpin-pemimpin desa yang memiliki kapasitas serta keberpihakan pada kemajuan masyarakat secara menyeluruh. Demokrasi desa yang sehat dan rasional tidak akan tercapai hanya melalui reformasi sistem, tetapi harus melalui revolusi kesadaran warga, yang ditanamkan secara perlahan melalui pendidikan politik yang sesuai dengan realitas di desa.

Dapat disimpulkan bahwa politik identitas marga di Desa Kem-Kem merupakan realitas yang kompleks. Di satu sisi, identitas marga menjadi sumber solidaritas dan arah politik masyarakat. Namun di sisi lain, munculnya kesadaran rasional menunjukkan bahwa politik desa memiliki potensi untuk berkembang menuju demokrasi yang lebih adil, terbuka, dan ideal.

4. SIMPULAN

Penelitian di Desa Kem-Kem menunjukkan bahwa politik identitas berbasis marga masih terdapat pada beberapa kelompok masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Mereka cendrung memilih calon kepala desa dari marga yang sama karena kedekatan emosional, hubungan kekerabatan, dan nilai-nilai adat. Tokoh adat dan tetua marga juga memiliki peran dalam mengarahkan pilihan politik di kalangan masyarakat, mereka merasa wajib mengikuti arahan tersebut karena rasa hormat terhadap tradisi. Marga dominan seperti Ginting memiliki pengaruh besar karena kekuatan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan marga lainnya serta memiliki peran strategis dalam struktur social di desa Kem-Kem.

Meskipun demikian, sudah ada beberapa masyarakat mulai mempertimbangkan program kerja, visi-misi, dan kompetensi calon dari pada sekadar kesamaan marga. Keberhasilan calon kepala desa dari marga minoritas menjadi bukti pergeseran ini. Pergeseran ini menunjukkan potensi desa Kem-Kem untuk mengembangkan demokrasi yang lebih adil, terbuka dan ideal. Transformasi ini membutuhkan proses panjang dan pendidikan politik berkelanjutan.

Politik identitas marga yang terjadi di Desa Kem-Kem merupakan kebiasaan yang sejak lama dalam kehidupan sosial masyarakat, hal ini menjadi dasar bagi tatanan sosial yang erat dan saling terkait. Meskipun demikian, hal ini juga menunjukkan potensi besar untuk berkembang menuju demokrasi yang lebih adil dan terbuka seiring dengan meningkatnya kesadaran rasional di kalangan masyarakat. Ini berarti politik identitas, yang selama ini menjadi fondasi kuat dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dapat bertransformasi menjadi kekuatan yang mendukung demokrasi yang lebih adil, terbuka dan ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farisi, L. S. (2018). Politik identitas: Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Pancasila. *Jurnal Aspirasi*, 1(1), 77–90. <https://doi.org/10.21580/jpw.v1i1.2026>
- Amelia, I., & Pinem, W. (2024). Partisipasi politik kaum disabilitas (Studi kasus pemilihan kepala desa Helvetia Kabupaten Deli Serdang tahun 2022). *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(2), 977. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i2.3989>
- Andriansyah, O. (2023). Politik identitas etnik asli Papua berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Anggara, S. (2013). *Sistem politik Indonesia* (Cet. 1). CV Pustaka Setia.
- Bangun, R. (1996). *Mengenal suku Karo*. Yayasan Budaya Karo.

Berutu, R. A., Saragih, A. Y., Gurning, F. L., Pasaribu, A., & Halking. (2025). Politik identitas pada pemilihan kepala desa di Desa Dolog Huluau Kecamatan Dolog Masagal Kabupaten Simalungun. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(1), 40–51. <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i1.2344>

Buchari, S. A. (2023). *Politik identitas sebagai tantangan baru di era globalisasi*.

Creswell, J. W. (2015). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (Edisi ke-4; A. Fawaid, Trans.). Pustaka Pelajar.

Dauly, S. M., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Politik identitas pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 49–56. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2230>

Gurning, F. L., Simangunsong, M., Sihombing, A. F., Siregar, D. D. S., & Prayetno. (2023). Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula menjelang pemilu eksekutif tahun 2024. *Journal of Teaching and Science Education (JOTASE)*, 1(1), 34–39.

Habibi, M. (2018). Analisis politik identitas di Indonesia. <https://doi.org/10.31227/osf.io/pey72>

Hakiki, K. M. (2017). Politik identitas agama lokal (Studi kasus aliran kebatinan). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 159–174. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v11i1.617>

Hendardi. (2022). *Pancasila, kebebasan beragama/berkeyakinan, dan tantangan politisasi identitas dalam tata kebinaan Indonesia*.

Herdiana, D. (2020). Konstruksi politik identitas melalui nilai-nilai Islam dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(2), 253–274. <https://doi.org/10.24042/tps.v15i2.5107>

Hutapea, E. K., Santoso, P., Sitinjak, H. F., & Sukendro, A. (2023). Tantangan dan upaya penanganan politik identitas pada Pemilu 2024. *Jurnal Kewarganegaraan*.

Ivanna, J., Arpani, P., Sianipar, L., & Sihaloho, F. (2024). Strategi pemilihan kepala desa di Desa Medan Estate Kabupaten Deli Serdang. *Kybernetology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 2(1), 50–56.

Ivanna, J., Hutajulu, H. M. R., & Putri, A. (2024). Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.616>

Ivanna, J., Rosha, M. A., Muham, A. P., & Damanik, P. Y. (2023). Persepsi masyarakat terhadap praktik budaya politik identitas pada pemilihan kepala desa di Desa Namu Ukur Utara, Langkat. *Mediation: Journal of Law*, 2(1), 33.

Jamaluddin, M. (2023). *Politik identitas etnis: Bentuk ikatan primordialisme dalam sistem politik di Kalimantan Barat*.

Juliandi, & Halking. (2024). Pengaruh money politic dan politik identitas terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pakpak Bharat 2019 (Studi

- kasus Desa Tanjung Mulia). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 85. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v8i2.7754>
- Julita, E., Gultom, L. H., Carnova, Y. T., & Ivanna, J. (2024). Politik identitas pada pemilihan kepala desa: Studi kasus Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 13436–13445.
- Mangido Nainggolan, et al. (2024). Fungsi agama Kristen dalam kehidupan individu dan masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 15087.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (T. R. Rohidi, Trans.). Universitas Indonesia Press.
- Morissan. (2019). *Riset kualitatif*. Prenadamedia Group.
- Muhtadi, M. (2020). *Politik identitas dalam pemilihan umum di Indonesia*.
- Nasrudin, M., & Nurdin, A. (2019). *Politik identitas: Isu etnis dan agama dalam kontestasi politik*.
- Nasution, F. (2012). *Jejak sejarah dan budaya Karo*. Mitra.
- Panjaitan, P. A. (2023). Analisis politik identitas terhadap pemilu (Studi kasus di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung).
- Panjaitan, P. A., Ramadhania, J. A., Lumban Gaol, R. S., Sidebang, D. D., & Ivanna, J. (2023). Analisis politik identitas terhadap pemilu (Studi kasus di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 8744–8752.
- Pinem, W. (2023). Segmentasi klan (marga) dalam Pilkades Desa Pohan Jae tahun 2015. *Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 22.
- Rahman, F., & Wardana, D. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di masa pandemi Covid-19. <https://doi.org/10.25299/jmp.2024.17448>
- Rahmaniah, S. (2013). *Budaya dan identitas*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Rozi, S., et al. (2019). *Politik identitas: Problematika dan paradigma*. Bumi Aksara.
- Sagala, I. D., & Sarumpaet, B. A. M. (2018). Politik identitas etnis dalam Pilkada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai tahun 2015. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 4(1), 149. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10268>
- Sarumpaet, B. A. M. (2012). Politik identitas etnis dalam kontestasi politik lokal. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(2), 52.
- Sitanggang, A., et al. (2024). Budaya politik pemuda Batak di Gereja HKBP Simpang Marindal (Studi terhadap partisipasi politik Pilpres 2024). *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 127–133. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3747>

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabetia.

Wijana, I. N. (2020). Budaya dalam politik identitas di Indonesia. *Jurnal Renaissance*.